



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Poros Makassar – Parepare
Email : set.pangkep@bawaslu.go.id

Nomor : 035 /PM.00.02/K.SN-13/03/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

18 Maret 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Isi imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum:
 - a) Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas*:
 - a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
 - 1) Pelanggaran Pemilu; dan
 - 2) Sengketa proses Pemilu.
 - b. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang terdiri atas : f. Mengelolo, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan pengawasan perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Umum:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 20:

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- f. Mengelolo, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
 - g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka sebagai langkah pencegahan bersama ini kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan kewenangan masing-masing agar memastikan:
 - a. Memastikan dokumen hasil Pemilihan Umum dikelola, disimpan dan diamankan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak melakukan tindakan yang dapat dimaknai sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang dan Peraturan KPU yang ada;
 - b. Memastikan seluruh arsip/dokumen dapat dikelola dan diinventaris oleh KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n KETUA,
KOORDINATOR DIVISI HUKUM,
PENCEGAHAN, PARMAS DAN
HUMAS



ANDI HIKMAWATI, S.E

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip.